

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

(Studi Kasus : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2016)

DIDI MULYADI

Email : didimulyadiumy@yahoo.com

SINOPSIS

Skripsi ini mengambil judul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bagian Pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus : Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016). Berbicara tentang program Kota Layak Anak berarti memenuhi lima Hak-hak Anak (Hak Hidup, Hak Tumbuh Hak Berkembang, Hak Berpartisipasi, Hak Perlindungan), disini kita lihat realitanya masih ada siswa yang putus sekolah karena faktor pendidikan semakin mahal, dan tidak mendapatkan layanan biaya sekolah tambahan JPD (Jaminan Pendidikan Daerah), Dinas Pendidikan menyelenggarakan layanan anak berkebutuhan khusus (Inklusi) untuk memenuhi hak anak yang berkebutuhan khusus, Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pendidikan mengimplementasikan program KLA bagian pendidikan maka dalam penelitian ini akan menjawab, Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak bagian pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Bagian Pendidikan Di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Kantor Perlindungan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, Badan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Bentuk Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap program Kota Layak Anak (KLA) tahun 2015 adalah dengan Implementasi program KLA yang ada Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Terhadap Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Sekolah Inklusi, Peningkatan Pendidikan Usia Dini (PAUD).

Dinas Pendidikan telah mengimplementasikan program Jaminan Pendidikan Daerah, Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Inklusi berjalan dengan baik, walau masih ada beberapa faktor yang membuat program Jaminan Pendidikan Daerah sedikit terhambat dalam mengimplementasikan, diakibatkan karena Faktor Internal: Konten Kebijakan, Kapasitas Organisasi dan Faktor Eksternal : Lingkungan Kebijakan dan Kelompok sasaran program.

Kendala atau kesulitan yang muncul di dalam program KLA sebagai dampak program Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta dari Dinas Pendidikan yaitu kurang maksimalnya pelayanan masyarakat yang mengurus JPD Di Dinas Pendidikan dan tidak melakukan pemantauan lanjutan ke masing-masing desa karena terkendala jumlah personil yang ada di Dinas Pendidikan pelayanan JPD, sehingga jumlah staf di bidang JPD harus di tambah karena jumlah yang ditangani sangat banyak akibatnya pelayananpun terhambat.

Kata Kunci : Implementasi, Kota Layak Anak, Program, Dinas Pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan adanya konvensi tersebut, berarti secara hukum negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak anak-anak, baik sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Hardius Usman & Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, hal. 1). Kota Layak Anak (KLA) adalah istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten dan kota yang ada di wilayah Indonesia.

Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) di DIY Tahun 2014 jumlah siswa putus sekolah mencapai angka 58 siswa terdiri dari SD sebanyak 4 siswa, SMP sebanyak 45 dan SMA sebanyak 9 siswa, sehingga masalah pendidikan ini harus segera di peroleh jalan keluarnya, suatu daerah memiliki kualitas pendidikan yang baik, maka niscaya daerah tersebut akan lebih maju dan berkembang. Hal ini memberikan gambaran, bahwa memfasilitasi pendidikan anak sangat diperlukan demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Keluarga sebagai lingkungan terdepan bagi anak sangat menentukan masa depan anak, kerapuhan keluarga menjadi faktor dominan terhadap kompleksitas permasalahan pendidikan anak, anak putus sekolah, anak Inklusi (berkebutuhan khusus), karena faktor ekonomi, perlindungan anak sudah semestinya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan pendidikan masa keemasan anak (<http://www.kpai.go.id>. 2016).

Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya masyarakat yang tinggal dan menetap di Wilayah Kota Yogyakarta. Kontribusi yang diberikan misalnya anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan belajar, serta yang terpenting anak mendapatkan hak-haknya seperti putus sekolah dan meraih cita-cita anak, yang dapat membahayakan anak itu sendiri. Selain itu, bertujuan untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam, sumber daya sarana prasarana dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak (Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011).

Menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Yogyakarta, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, Kota Yogyakarta terus berbenah diri untuk menerapkan dan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, di samping sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memperolehnya kategori tingkat Madya (<http://jogja.tribunnews.com>. 2016) untuk menuju kota layak anak tingkatan Kota Layak Anak dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu : Pertama, Madya, Nindyaa, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak (Sutama, 2012, hal. 6).

Namun, kategori Madya yang diperoleh Kota Yogyakarta sebagai kota yang fokus terhadap isu anak tidak hanya terbeban dari berbagai permasalahan terkait anak. Hal ini terbukti bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2013, hanya mengalami sedikit penurunan pelajar putus seperti tabel berikut :

Tabel Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta

No	Tahun	SD		SMP		SMA		Jumlah
1	2012	8	7	6	5	110	43	179
2	2013	8	4	31	13	104	17	177

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Supaya dapat menjadi Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Yogyakarta harus memenuhi indikator yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak

Anak, salah satu persyaratan pokok utama adalah adanya instrumen hukum daerah yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Hal ini tentunya sangat penting dan harus dicermati agar jangan sampai instrumen tersebut hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mencapai predikat kota layak anak khususnya bidang pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dapat terpenuhi.

Kota Layak Anak termasuk salah satu bentuk urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan terus mengupayakan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak, sesuai dengan konvensi hak anak yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kota Layak Anak. Berdasarkan siswa putus sekolah dan siswa berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan layaknya anak normal lainnya yang perlu di cari jalan keluarnya.

Peneliti ini tertarik menganalisa implementasi program Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta bagian pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta seperti Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Program Inklusi.

Selain gambaran implementasi program KLA di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta peneliti juga ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan KLA bagian Pendidikan Di Kota Yogyakarta tahun 2015 dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program KLA Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Jika tidak ada komitmen dan kemauan dari pemerintah Kota Yogyakarta maka program KLA tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, bila ada kemauan dan komitmen dari pemerintah Kota Yogyakarta maka program KLA akan berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus dari penelitian tentang implementasi program KLA di Kota Yogyakarta bagian pendidikan.

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Amir Santoso mengatakan proses kebijakan terdiri dari enam tahapan yakni : perumusan masalah, pembuatan agenda, pembuatan kebijakan, adopsi kegiatan, penerapan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Santoso, 1990, hal. 23)

Menurut Thomas Dye dalam buku Subarsono, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do) (Subarsono, 2012, hal. 2). Sedangkan Menurut James E. Anderson dalam buku Subarsono, kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Subarsono, 2012, hal. 2). Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Subarsono, 2012, hal. 2).

William N.Dunn dalam buku Subarsono, Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas Pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain (Subarsono, 2012, hal. 2).

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (1980) dalam buku Suranto studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Suranto, 2014, hal. 38).

Edward III (1980) mengungkapkan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap kecenderungan) dan Struktur Birokrasi.

Adapun secara terperinci Edwards III (1980) menjelaskan empat faktor tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif dan penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam implementasi kebijakan komunikasi, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada persoalan yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten. Dengan demikian dalam faktor komunikasi terdapat tiga aspek pokok, yaitu : Transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber Daya

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif maka dibutuhkan sumberdaya yang cukup. Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Dimana sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan atau sumber dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan yang mutlak diperlukan.

- a. Staf, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan
- b. Informasi

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan disini adalah :
1) informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut serta 2) data terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Wewenang

Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti misalnya : hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dan membeli barang, jasa dan memungut pajak.

d. Fasilitasi-fasilitas

Fasilitas-fasilitas meliputi bangunan, perlengkapan, perbekalan.

3. Disposisi (Sikap Kecenderungan)

Yang dimaksud disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (*Standard Operating Procedures*) dan (*Fragmentation*). Berikut faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan dapat terlihat pada gambar berikut.

3. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Menurut Nirwono Joga, Kota Layak Anak adalah suatu kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi (<http://bincang2cupleez.multiply.com.02-09-2016>). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang analisisnya dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis data diantaranya wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, Lexy J, 2011) Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara, dokumentasi. Hasil data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut, kemudian penulis susun menjadi laporan sistematis. Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif yang didukung dengan teori dan sumber dari buku, selanjutnya dianalisa untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2015. Tahap terakhir yakni menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bagian Pendidikan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015

Implementasi Program Dinas Pendidikan terhadap program, Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Program Inklusi Di Kota Yogyakarta Implementasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan cara mensosialisasikan JPD bersama tokoh masyarakat dan Dinas Pendidikan mensosialisasikan kesemua tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Dan implementasi Program Inklusi berjalan dengan sangat baik memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan Hak-hak dalam pendidikan layaknya anak normal lainnya. Implementasi program peningkatan layanan pendidikan usia dini juga berjalan dengan baik juga, mengimplementasikan program dengan seminar menunjang pendidik, mengadakan workshop, juga pelatihan kepada pendidik.

Dari hasil Implementasi tahun 2015 angka pelayanan pendidikan sudah baik, dan ditinjau dari penilaian KLA Indikator yang di tetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan 60 indikator, bagian pendidikan sudah mendapatkan rata-rata nilai level 4 (empat)/nilai baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Bagian Pendidikan Di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian penyebab Implementasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2015 terhadap program Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Sekolah Inklusi Di Kota Yogyakarta, sudah berjalan dengan baik, terutama program Sekolah Inklusi dan Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini sangat berjalan dengan baik dan masyarakat Kota Yogyakarta merasakan dampak positif. walau ada beberapa hambatan dalam meimplementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di karenakan oleh beberapa faktor.

- a. Faktor internal, kurangnya personil di bagian JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, kemudian terjadi hambatan pelayanan dari masyarakat yang melapor JPD ke Dinas Pendidikan, Faktor-faktor tersebut termasuk dalam variabel konten kebijakan. Sedangkan, pada variabel kapasitas organisasi antara lain karena memiliki birokrasi *complex structure*, komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan, serta sumber daya manusia yang belum memadai.
- b. Faktor eksternal, disebabkan oleh terjadinya intervensi tokoh elit terhadap implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah. Faktor tersebut termasuk dalam variabel lingkungan kebijakan. Pada variabel kelompok sasaran program (target group) dikarenakan masih rendahnya kesadaran diri dari warga Kota Yogya yang mampu, dan KMS digunakan sebagai motif warga Kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik seperti bidang JPD, Peningkatan Layanan PAUD, Sekolah Inklusi, walau masih ada kendala yang ditemukan dalam program JPD dalam bentuk mengimplementasikan program berkaitan dengan Kota Layak Anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhinya Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Tahun 2015. Program Peningkatan layanan PAUD dan Sekolah Inklusi memiliki aspek komunikasi sudah baik. Aspek sumber daya sudah baik, aspek disposisi sudah baik, aspek struktur birokrasi sudah baik, walau masih ada kekurangan dalam semua faktor implementasi dalam program Jaminan Pendidikan Daerah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Dalam *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. L. (1972). *Understanding Publicity*. New Jersey.
- Gibson. (1986). *Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hardius Usman & Nachrowi Djalal Nachrowi. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan & Eksploitasi)*. Jakarta: Grasindo.
- Kismartini, dkk. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, R. (2003). *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Riant Nugroho D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, A. (1990). *Pengantar analisis kebijakan negara*. Jakarta: Rineka, Cipta.
- Solichin, A. W. (1991). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara,.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suranto. (2014). *implementasi kebijakan otonomi pelayanan pendidikan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sutama, I Made. (2012). "Konsep Pembangunan Global dan Nasional Perlindungan Anak" *Pidato, Seminar Nasional world Fit For Children dalam Rangka Dies Natalis*. Semarang: UNDIP.
- Thomas L. Dye. (1972). *Understanding Publicity, Prentice Hall*. New Jersey: Inc.
- winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

INTERNET

- <http://bincang2cupleez.multiply.com> Program Pengembangan Kota Layak Anak Di 26 Kabupaten/Kota Di Akses Pada Tanggal 02-09-2016 Pukul 10:00 WIB
- <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi/> Di Akses Pada Tanggal 15-09-2016 Pukul 20:00 WIB

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121 Di Akses Pada Tanggal 17-09-2016 Pukul 10:00 WIB

[http://jogja.tribunnews.com.kota-yogya-gagal-naik-tingkat-penghargaan-kota layak-anak-2015](http://jogja.tribunnews.com.kota-yogya-gagal-naik-tingkat-penghargaan-kota-layak-anak-2015) Di Akses Pada Tanggal 19-09-2016 Pukul 21:00 WIB

<http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/dok-perencanaan/RancanganRPJMD2012-2016.pdf> Di Akses Pada Tanggal 19-09-2016 Pukul 22:00 WIB

http://www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=60 Di Akses Pada Tanggal 20-10-2016 Pukul 13:15 WIB

<http://jogjakota.bps.go.id> Di Akses Pada Tanggal 21-10-2016 Pukul 13:15 WIB

PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).

Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008

Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah

Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian JPD

Keputusan Wali Kota Nomor 43 tahun 2016 Tentang Pembentukan Gugus tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kota Layak Anak